

Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipatif Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Keuangan di Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember

Muhammad Muhibudin^a, Agustin HP^b, Wiwik Fitria Ningsih^c

^a*Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Mandala, muhammadmuhibudin01@gmail.com*

^b*Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Mandala, agustin@stie-mandala.ac.id*

^c*Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Mandala, wiwik@stie-mandala.ac.id*

Email Penulis Korespondensi : agustin@stie-mandala.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

10 Februari 2022
03 Maret 2022
20 April 2022

Keywords:

***Transparency,
Accountability,
Government participation,
Village financial
management***

Kata Kunci:

***Transparansi,
Akuntabilitas, Partisipasi
Pemerintah, Pengelolaan
Keuangan Desa***

ABSTRACT

Government accounting is one of the fields of accounting that specializes in recording and reporting transactions that occur in government agencies. The existence of demands for accountability and transparency on the recording of transactions, and reporting of government performance by interested parties makes government accounting a necessity that is no longer inevitable today. Villages have an important role, especially in carrying out tasks in the field of public services. Therefore, it is necessary to know the extent of transparency, accountability and participation in village financial management considering that this is very closely related to the continuity of the welfare of the wider community. This study aims to analyze the effect of transparency, accountability, and government participation on village financial management (case study in Tanggul Sub-district, Jember district. The data that used in this research is primary data. The method that researcher used is survey method with quantitative approach. The researcher used SPSS version 24 to test the data. Based on data analysis, the conclusion of this study is partially there are not significant effect of accountability and government participation to village financial management, while transparency has significant effect to village financial management. Simultaneously transparency, accountability, and government participation have significant effect to village financial management.

ABSTRAK

Akuntansi pemerintahan adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan

transaksi – transaksi yang terjadi di badan pemerintahan. Adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi atas pencatatan transaksi – transaksi, dan pelaporan kinerja pemerintahan oleh pihak – pihak yang berkepentingan menjadikan akuntansi pemerintahan sebuah kebutuhan yang tidak lagi terelakkan saat ini. Desa memiliki peran yang penting, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Oleh karena itu perlu diketahui sejauh mana transparansi, akuntabilitas dan partisipatif dalam pengelolaan keuangan Desa mengingat hal tersebut sangat erat kaitannya dengan kelangsungan kesejahteraan masyarakat luas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi pemerintah terhadap pengelolaan keuangan desa (studi kasus di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Metode yang peneliti gunakan adalah metode survei. Dengan pendekatan kuantitatif, peneliti menggunakan SPSS versi 24 untuk menguji data. Berdasarkan analisis data, kesimpulan dari penelitian ini adalah secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara akuntabilitas dan partisipasi pemerintah terhadap pengelolaan keuangan desa, sedangkan transparansi berpengaruh signifikan terhadap keuangan desa. Secara simultan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa.

PENDAHULUAN

Akuntansi adalah ilmu yang saat ini berkembang dengan pesat, khususnya dalam bidang akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi – transaksi yang terjadi di badan pemerintahan. Adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi atas pencatatan transaksi – transaksi, dan pelaporan kinerja pemerintahan oleh pihak – pihak yang berkepentingan menjadikan akuntansi pemerintahan sebuah kebutuhan yang tidak lagi terelakkan saat ini. Dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang baik, perlu adanya peningkatan dalam prinsip demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam sebuah proses demokrasi, peran ilmu akuntansi pemerintahan khususnya dalam prinsip akuntabilitas publik menjadi salah satu hal yang sangat krusial karena menjadi prasyarat dasar dari keberhasilan demokrasi itu sendiri. Demokrasi tidak akan berjalan dengan baik apabila akuntabilitas sektor pemerintahan tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Salah satu kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur derajat akuntabilitas pemerintahan adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah. Keuangan negara memiliki peranan yang penting karena keuangan negara mempresentasikan semua

aktivitas dan kebijakan politik dan ekonomi suatu pemerintahan (Wida, 2016).

Akuntansi Pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa. Prinsip dalam akuntansi pemerintahan seperti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga daerah seperti desa. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis. Dikarenakan kemajuan dari sebuah negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desa, karena tidak ada negara yang maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa kabupaten yang maju, dan tidak ada kabupaten yang maju tanpa desa dan kelurahan yang maju. Ini berarti bahwa basis kemajuan sebuah negara ditentukan oleh kemajuan desa (Wida, 2016).

Menurut Peraturan Menteri No. 113 tahun 2014 menjelaskan pengertian desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sujarweni, 2015).

Desa memiliki peran yang penting, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan - kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. Oleh karena itu perlu diketahui sejauh mana transparansi, akuntabilitas dan partisipatif dalam pengelolaan keuangan Desa mengingat hal tersebut sangat erat kaitannya dengan kelangsungan kesejahteraan masyarakat luas.

Pada mengelola keuangan desa di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dengan diiringi Peraturan menteri dalam negeri no. 113 tahun 2014 pasal 2 ayat 1 keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Sujarweni, 2015).

Kecamatan Tanggul adalah sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Jember bagian barat yang terdiri dari 8 desa yaitu Darungan, Klatakan, Kramat Sukoharjo, Patemon, Manggis, Selodakon, Tanggul Kulon dan Tanggul Wetan. Dari beberapa desa tersebut dalam pembangunan infrastrukturnya kurang

memenuhi standar yang sudah ada, dari beberapa hasil pembangunannya hanya bertahan kurang dari 2 tahun penggunaan. Dari beberapa desa yang ada di kecamatan tanggul dalam hal pembangunan infrastruktur masih kurang baik, seperti jalan poros, jalan plosok, bronjongan air/bendungan dll. Padahal infrastruktur tersebut amat penting terhadap masyarakat karena hal tersebut juga ikut menunjang perekonomian masyarakat desa. Hal tersebut terjadi apakah karena kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pemerintahan desa, atau sebaliknya prinsip transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa yang kurang baik.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah transparansi berpengaruh secara parsial terhadap pengelolaan keuangan desa? 2) Apakah akuntabilitas berpengaruh secara parsial terhadap pengelolaan keuangan desa? 3) Apakah partisipatif berpengaruh secara parsial terhadap pengelolaan keuangan desa? 4) Apakah transparansi, akuntabilitas dan partisipatif berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan keuangan desa?

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Pengertian Desa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Sujarweni (2015:1) desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (di kepalai oleh seorang Kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan.

Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa (Sujarweni, 2015:17). Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Bendahara desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan,

membayar dan mempertanggung-jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes. Menyampaikan sekaligus mempertanggung-jawabkan laporan-laporan terkait realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota seperti laporan penyelenggaraan pemerintah desa (LPPD), laporan akhir masa jabatan, dll.

Transparansi

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan, serta hasil-hasil yang dicapai (Sujarweni, 2015:28). Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung-jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Sujarweni, 2015:28).

Akuntabilitas

Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa tiap-tiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan desa dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat secara terbuka (Sujarweni, 2015:28). Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang amanah untuk memberikan pertanggung-jawaban, menyajikan dan memngungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi pertanggung-jawabannya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung-jawaban tersebut (Sujarweni, 2015:28).

Partisipatif

Partisipasi adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa dimana mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung dan tidak langsung (Sujarweni, 2015:29).

METODA PENELITIAN

Objek dalam penelitian ini adalah Seluruh Desa Di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, yang terdiri dari 8 desa yaitu Desa Darungan, Klatakan, Kramat Sukoharjo, Patemon, Manggis, Selodakon, Tanggul Kulon dan Tanggul Wetan. Populasi dalam penelitian ini adalah semua perangkat/pemerintahan Desa

dari 8 desa di Kecamatan Tanggul yang berjumlah 158 orang, sedangkan sampel dalam penelitian ini berjumlah 79 orang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling dengan berdasarkan kriteria perangkat desa yang terkait dalam pengelolaan keuangan desa dan yang mempunyai masa kerja dalam bidang pengelolaan keuangan desa minimal 1 tahun.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan sumber data yang digunakan adalah data primer. Penelitian metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan datanya menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2018). Data primer adalah kegiatan pengambilan data dimana sumber data langsung memberikan data kepada pengumpul data atau peneliti (Sugiyono, 2018).

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan kuisisioner dengan skala *likert* dengan pilihan jawaban dan bobot nilai jawaban responden sebagai berikut: SS=Sangat Setuju (5), S=Setuju (4), RG=Ragu-ragu (3), TS=Tidak Setuju (2), dan STS=Sangat Tidak Setuju (1).

Penelitian ini menggunakan beberapa metode analisis data yaitu: 1) Uji Instrumen yaitu (a) Uji Validitas dan (b) Uji Reliabilitas; 2) Uji Asumsi Klasik dengan uji yang digunakan yaitu (a) Uji Normalitas, (b) Uji Multikolinieritas, (c) Uji Autokorelasi dan (d) Uji Heteroskedastisitas; 3) Uji Hipotesis, uji hipotesis yang digunakan yaitu: (a) Uji Simultan/Uji F dan (b) Uji Parsial/Uji t.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Data penelitian dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara membagikan kuisisioner secara langsung kepada responden yang telah memenuhi kriteria peneliti. Pengambilan data secara langsung dengan menemui responden tersebut dilaksanakan dengan tujuan agar lebih efektif dalam meningkatkan *respon rate* dari responden. Jumlah kuisisioner yang tersebar sebanyak 79 kuisisioner.

Tabel 1. Hasil Deskripsi Jawaban Responden dari Variabel Transparansi (X1), Akuntabilitas (X2) Dan Patisipatif (X3)

Pilihan jawaban		jumlah jawaban												Total
		responden x1			total	responden x2				Total	responden x3			
		x1.1	x1.2	x1.3		x2.1	x2.2	x2.3	x2.4		x3.1	x3.2	x3.3	
SS	5	30	39	42	111	35	39	50	27	151	42	30	40	112
S	4	38	37	25	100	28	29	27	37	121	26	40	24	90
RG	3	11	3	12	26	16	11	2	15	44	6	2	15	23
TS	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	0	12
STS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		79	79	79		79	79	79	79		79	79	79	

Tabel 2. Hasil Deskripsi Jawaban Responden dari Variabel Pengelolaan Keuangan (Y)

Pilihan jawaban		jumlah jawaban responden y																	total
		y1	y2	y3	y4	y5	y6	y7	y8	y9	y10	y11	y12	y13	y14	y15	y16	y17	
SS	5	38	37	28	30	38	42	28	30	44	23	29	29	40	44	30	32	35	577
S	4	34	28	35	38	37	23	31	32	26	38	35	41	33	25	34	31	30	551
RG	3	7	14	16	11	3	11	20	17	3	12	14	9	6	9	14	14	9	189
TS	2	0	0	0	0	1	2	0	0	6	6	1	0	0	1	1	2	5	25
STS	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Total		79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	

Hasil Uji Instrumen

Hasil Uji Validitas

Setelah mendapatkan hasil kuisioner untuk mengetahui apakah data yang diperoleh atau tidak dapat dilakukan dengan pengujian validitas yaitu jika R hitung lebih besar dari R tabel dan nilai positif maka butir atau pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid (uji dua sisi), uji validitas dapat dilakukan dengan melakukan korelasi bivariate antara masing masing skor indikator dengan total skor konstruk (Ghozali, 2013:52) R tabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0,1814 dengan jumlah N= 79. R hitung pada X1 (Transparansi) > R tabel (terlihat pada kolom X1, Pearson Correlation). Dengan ini maka data pada variabel transparansi dinyatakan valid. R hitung pada X2 (Akuntabilitas) > R tabel (terlihat pada kolom X2, Pearson Correlation). Dengan demikian maka data pada variabel akuntabilitas dinyatakan valid.. R hitung pada X3 (Partisipatif) > R tabel (terlihat pada kolom X3, Pearson Correlation). Dengan demikian maka data pada variabel akuntabilitas dinyatakan valid. R hitung yang dimiliki Variabel Y

(Pengelolaan Keuangan Desa) $> 0,1814$ atau r tabel. Dengan demikian maka data pada variabel pengelolaan keuangan desa dinyatakan valid.

Hasil Uji Reliabilitas

Dasar keputusan yang digunakan adalah apabila Cronbach Alpha $> 0,60$ maka kuisioner dinyatakan reliabel. Jika $< 0,60$ maka berlaku sebaliknya. Cronbach Alpha memiliki nilai sebesar $0,765$. Nilai tersebut menggambarkan bahwa Cronbach Alpha $> 0,60$. Dari hasil tersebut maka variabel transparansi dinyatakan reliabel. Cronbach Alpha pada variabel akuntabilitas memiliki nilai sebesar $0,724$. Nilai tersebut menggambarkan bahwa Cronbach Alpha $> 0,60$. Dari hasil tersebut maka variabel akuntabilitas dinyatakan reliabel. Cronbach Alpha pada variabel partisipatif memiliki nilai sebesar $0,717$. Nilai tersebut menggambarkan bahwa Cronbach Alpha $> 0,60$. Dari hasil tersebut maka variabel partisipatif dinyatakan reliabel. Tabel Cronbach Alpha pada variabel akuntabilitas memiliki nilai sebesar $0,652$. Nilai tersebut menggambarkan bahwa Cronbach Alpha $> 0,60$. Dari hasil tersebut maka variabel akuntabilitas dinyatakan reliabel.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

Uji Normalitas dengan menggunakan uji statistik dapat dilihat dari nilai signifikansinya, jika nilai signifikan $> 0,05$ maka data berdistribusi normal, Jika Signifikansinya $< 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal (Sujarweni, 2015:55). Nilai signifikansi yang diperoleh sebesar $0,200$. Nilai ini lebih dari $0,05$, dengan ini maka data dinyatakan terdistribusi normal.

Hasil Uji Multikolinieritas

Untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menemukan multikolinieritas adalah nilai tolerance $> 0,10$ atau sama dengan nilai VIF < 10 (Ghozali, 2013:103). Menurut hasil pengujian pada Tabel 3 diketahui bahwa nilai *tolerance* $> 0,10$ dan VIF < 10 . Dari hasil tersebut maka pada penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Nilai Tolerance > 0,10	Nilai VIF <10
Transparansi	0,976	1,025
Akuntabilitas	0,974	1,027
Partisipatif	0,987	1,014

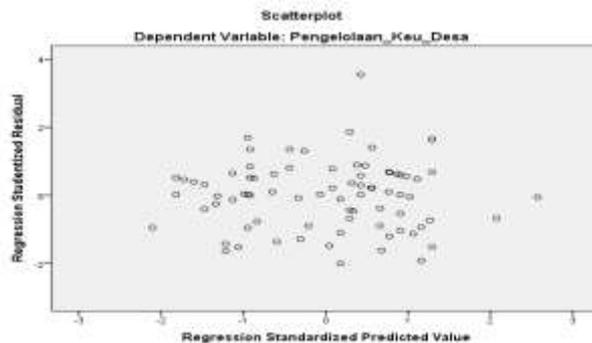
Hasil Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Penelitian ini menggunakan tabel Durbin-Watson untuk mendeteksi terjadinya autokorelasi. Berdasarkan tabel DW, $n = 3$ maka $DL=1,5568$ sedangkan $Du=1,7141$. Nilai DW pada hasil uji adalah sebesar 1,690. $DL < D < Du$. $1,5568 < 1,690 < 1,7141$. Dari hasil tersebut maka tidak ada autokorelasi yang terjadi pada penelitian ini.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan Gambar 1 yaitu *scatterplot* dapat diketahui bahwa titik titik atau *scatterplot* tersebar rata (tidak berkumpul) dan menjauhi angka nol (0). Hal ini berarti pada penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan *Scatterplot*



Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model regresi berganda adalah suatu model dimanavariabel dependen tergantung pada dua atau lebih variabel dindependen (Firdaus:2019). Analisi ini digunakan untuk mengetahui pengaruh yang dimiliki variabel Transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif terhadap pengelolaan keuangan desa. Tabel 3 merupakan hasil analisis regresi linier berganda.

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0,011	0,001		8,379	0,000
	Transparansi	0,047	0,010	0,476	4,683	0,000
	Akuntabilitas	-0,029	0,015	-0,197	-1,943	0,056
	Partisipatif	0,009	0,008	0,103	1,024	0,309
a. Dependent Variable: Pengelolaan_Keu_Desa						

Berdasarkan Tabel 3 tersebut, maka persamaan regresi yang dapat adalah:
 $Y = 0,011 + 0,047X_1 - 0,029X_2 + 0,009X_3$

Penjelasan dari persamaan regresi diatas adalah:

1. Nilai konstanta bernilai positif 0,011 yang artinya menunjukkan besarnya pengelolaan keuangan desa akan meninggal sebesar 0,011 ketika transparansi, akuntabilitas dan partisipatif sama dengan nol/konstan.
2. Nilai koefisien regresi variabel transparansi sebesar 0,047 dengan nilai positif. Artinya jika apabila transparansi mengalami peningkatan maka pengelolaan keuangan desa semakin baik.
3. Nilai koefisien regresi variabel akuntabilitas sebesar -0,029 dengan nilai negatif. Artinya jika apabila akuntabilitas mengalami peningkatan maka pengelolaan keuangan desa menjadi kurang baik.
4. Nilai koefisien regresi variabel partisipatif sebesar 0,009 dengan nilai positif. Artinya jika apabila partisipatif mengalami peningkatan maka pengelolaan keuangan desa semakin baik.

Hasil Uji Hipotesis

Hasil Uji Parsial (t)

Hasil uji parsial (t) dapat dilihat pada Tabel 3, maka dapat disimpulkan hasil sebagai berikut:

1. Variabel Transparansi (X1)

Tabel 3 memberikan informasi bahwa t hitung sebesar 4,683 sedangkan t tabel sebesar 1,99045, t hitung > t tabel. Nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,00 atau < 0,05. Berdasarkan penjelasan tersebut maka variabel transparansi memiliki

pengaruh secara parsial terhadap pengelolaan keuangan desa.

2. Variabel Akuntabilitas (X2)

Tabel 3 memberikan informasi bahwa t hitung sebesar -1,943 sedangkan t tabel sebesar 1,99045, t hitung < t tabel. Nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,056 atau > 0,05. Berdasarkan penjelasan tersebut maka variabel akuntabilitas tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap pengelolaan keuangan desa.

3. Variabel Partisipatif (X3)

Tabel 3 memberikan informasi bahwa t hitung sebesar 1,024 sedangkan t tabel sebesar 1,99045, t hitung < t tabel. Nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,309 atau > 0,05. Berdasarkan penjelasan tersebut maka variabel partisipatif tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap pengelolaan keuangan desa.

Hasil Uji Simultan (F)

Tabel 4. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	0,000	3	0,000	8,128	0,000 ^b
	Residual	0,000	75	0,000		
	Total	0,000	78			
a. Dependent Variable: Pengelolaan_Keu_Desa						
b. Predictors: (Constant), Partisipatif, Transparansi, Akuntabilitas						

Tabel 4 tersebut menyatakan bahwa nilai F adalah 8,128 > 2,72 dan nilai signifikansi adalah 0,000 < 0,05 artinya variabel partisipasi, transparansi dan akuntabilitas berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan keuangan desa.

Hasil Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan dari model regresi dalam menerangkan variasi variabel 72 dependen. Berikut adalah data hasil pengujian:

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,495 ^a	0,245	0,215	0,00074	1,690
a. Predictors: (Constant), Partisipatif, Transparansi, Akuntabilitas					
b. Dependent Variable: Pengelolaan_Keu_Desa					

Berdasarkan Tabel 5, besarnya *adjusted R²* adalah 0,251 atau sebesar 21,5 %. Hal tersebut berarti variasi pemberdayaan masyarakat dapat dijelaskan oleh variasi dari ketiga variabel independen, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat sebesar 25,1 %. Sedangkan sisanya yang sebanyak 74,9% dijelaskan oleh hal lain di luar model dan/atau di luar variabel dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil analisis dan uji hipotesis yang telah dilaksanakan, menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa di kecamatan Tanggul. Transparansi sangat diperlukan karena mempunyai dampak bagi orang banyak.

Berdasarkan hasil analisis dan uji hipotesis yang telah dilaksanakan, menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa di kecamatan Tanggul kabupaten Jember. Hasil ini bertolak belakang dengan pendapat Ultrafiah (2017), Mas'ut & Indra (2018) dan Putra dkk (2019) yang menyatakan bahwa akuntabilitas secara signifikan berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Sedangkan hasil yang sama dinyatakan oleh Putri dkk (2020) akuntabilitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan hasil analisis dan uji hipotesis yang telah dilaksanakan, menunjukkan bahwa partisipatif tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Tanggul. Hal ini terbukti melalui jawaban responden bahwa partisipatif tanpa kinerja yang baik tidak akan mempengaruhi hasil pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan hasil analisis dan uji hipotesis yang telah dilaksanakan, menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa di kecamatan Tanggul.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh transparansi (X1), akuntabilitas (X2), dan partisipatif (X3) terhadap pengelolaan keuangan desa (Y). Penelitian ini menggunakan Kecamatan Tanggul sebagai objek penelitian. Berikut merupakan kesimpulan yang didapat dari penelitian ini:

1. Transparansi memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap pengelolaan keuangan desa.
2. Akuntabilitas tidak memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap pengelolaan keuangan desa.
3. Partisipatif tidak memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap pengelolaan keuangan desa.
4. Secara simultan variabel transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan penelitian, pembahasan dan kesimpulan diatas maka saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah: 1) Menggunakan metode penelitian lain seperti moderating atau intervening, 2) Menambah variabel penelitian seperti tingkat partisipasi masyarakat, aksesibilitas dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali Imam.2013. *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS* Semarang. Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali Imam.2014. *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS* 23. Semarang. Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanifah Indah Suci dan Praptoyo Sugeng .2015. *Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)*. Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 4 No. 8.
- Hehanussa, Salomi J. 2015. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. ISSN2302-9791. Vol.02 1 May 2015.
- Kurniawan, Adi Putra. 2019. *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa*. Universitas Muhammadiyah Magelang: Skripsi yang tidak dipublikasikan.
- Mas'ut & Indra Alimuddin Saragih. 2018. *Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Pembangunan Ekonomi Desa*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis 2 (18)
- Muslimin, Mappamiring dan St. Nurmaeta. 2012 *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto*. Otoritas Jurnal ilmiah Vol. II No. 1 April 2012.

- Pratama, Robiansyah Eka. 2018. *Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Dalam Pengelolaan Dana Desa*, Universitas Lampung: Skripsi yang tidak dipublikasikan
- Putra, Putu Andi SuarJaya dkk. 2017 *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)*. e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 Vol. 8 (2).
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfa Beta.
- Sujarweni, V Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka baru Press.
- Sujarweni, V Wiratna.2015. *SPSS Untuk Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sukmawati Fitri dan Nurfitriani Alfi.2019.*Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa*. Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, dan UMKM Volume. 2, No.1.
- Ultafiah, Weny. 2017. *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance*. Universitas Muhammadiyah Palembang: Skripsi yang tidak dipublikasikan.
- Wida, Siti Ainul. 2016. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add)*. e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 2017, Volume IV (2): 148-152 ISSN: 2355-4665